

**Nama : Anggi Fadhillah Putri**

**NPM : 2313031061**

**Kelas : 2023 C**

**Matkul : Ekonomi Pendidikan**

### **CASE STUDY**

#### **“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”**

Pemerintah Provinsi *Nusantara Raya* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah penduduk: 8 juta jiwa
- Anggaran pendidikan: 22% dari APBD
- 68% anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru
- 12% untuk infrastruktur
- 8% untuk program bantuan siswa (beasiswa & subsidi)
- 12% untuk administrasi dan lainnya

Namun, hasil evaluasi menunjukkan:

- Skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional
- Ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi
- Banyak sekolah memiliki guru berlebih di kota, tetapi kekurangan guru di daerah terpencil
- Infrastruktur digital sangat terbatas

Sebagai pembanding, pemerintah pusat ingin mendorong reformasi dengan merujuk praktik negara anggota OECD yang:

- Memiliki sistem *performance-based budgeting*
- Mengalokasikan dana berbasis kebutuhan siswa
- Mengutamakan peningkatan kualitas guru

- Menggunakan sistem evaluasi berbasis data

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan menjawab pertanyaan berikut:

### **1. Analisis Struktur Pengeluaran**

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?
- Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

#### **Jawaban:**

- Kalau dilihat, struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sebenarnya belum bisa dibilang efisien. Porsi anggaran yang terlalu besar untuk gaji dan tunjangan guru (68%) membuat ruang untuk peningkatan kualitas jadi sempit. Padahal, masalah utama justru ada pada kualitas pembelajaran dan ketimpangan antar daerah. Selain itu, anggaran untuk bantuan siswa dan infrastruktur, terutama digital, masih tergolong kecil. Jadi, yang perlu direalokasi adalah mengurangi dominasi belanja pegawai secara bertahap dan meningkatkan anggaran untuk pelatihan guru, pemerataan distribusi guru ke daerah terpencil, serta penguatan infrastruktur digital.
- Bagian yang perlu direalokasi adalah mengurangi secara bertahap dominasi belanja pegawai, lalu menambah porsi untuk peningkatan kualitas guru seperti pelatihan dan insentif berbasis kinerja, pemerataan distribusi guru ke daerah terpencil, serta penguatan infrastruktur terutama digital. Selain itu, anggaran untuk bantuan siswa juga bisa ditingkatkan agar lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan dengan baik. Intinya, anggaran perlu lebih diarahkan ke hal-hal yang langsung berdampak pada kualitas belajar siswa, bukan hanya untuk kebutuhan administratif atau rutin saja.

## 2. Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?
- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat!

### Jawaban:

- Jika dilihat dari kondisi yang ada pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih cukup bergantung pada pemerintah daerah karena sebagian besar anggaran berasal dari APBD. Ketergantungan ini membuat ruang gerak terbatas, apalagi ketika kebutuhan pendidikan semakin kompleks seperti peningkatan kualitas guru dan digitalisasi sekolah.
- Perlunya melibatkan sektor swasta dan skema pembiayaan alternatif itu menjadi penting. Model yang bisa digunakan misalnya kerja sama pemerintah dan swasta (*public-private partnership/PPP*) untuk pembangunan infrastruktur, terutama digital seperti internet dan perangkat belajar. Selain itu, perusahaan juga bisa dilibatkan melalui program CSR untuk beasiswa atau pelatihan guru. Bisa juga diterapkan skema pembiayaan berbasis kinerja, di mana dana diberikan berdasarkan hasil yang dicapai sekolah. Dengan cara ini, sumber pembiayaan jadi lebih beragam, tidak hanya bergantung pada pemerintah, dan juga bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara lebih efektif.

## 3. Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?
- Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

### Jawaban:

- Ada beberapa praktik dari negara OECD yang cukup realistis untuk diadopsi di Nusantara Raya adalah penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), alokasi dana berbasis kebutuhan siswa, serta fokus pada peningkatan kualitas guru. Sistem ini bisa membantu agar

anggaran lebih tepat sasaran, misalnya sekolah di daerah terpencil mendapat dana lebih karena kebutuhannya lebih besar. Selain itu, penggunaan data dalam evaluasi juga penting supaya kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya perkiraan.

- Tantangan penerapannya di Indonesia tidak hanya sedikit. Salah satunya adalah ketersediaan dan kualitas data yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kemampuan manajemen di tingkat daerah juga masih berbeda-beda, sehingga tidak semua siap menjalankan sistem yang lebih kompleks. Dari sisi sosial dan birokrasi, bisa juga muncul resistensi karena perubahan sistem biasanya tidak mudah diterima, apalagi jika menyangkut anggaran dan kinerja. Jadi, meskipun konsep dari negara OECD bagus, penerapannya di Indonesia perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing agar bisa berjalan efektif.

#### **4. Rancangan Reformasi**

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

- Perubahan struktur belanja
- Strategi peningkatan kualitas guru
- Digitalisasi sekolah
- Mekanisme monitoring dan evaluasi

#### **Jawaban:**

- Untuk reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun di Nusantara Raya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur belanja secara bertahap. Porsi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru yang saat ini terlalu besar bisa mulai dikendalikan, bukan dengan mengurangi hak guru, tetapi dengan menahan penambahan yang tidak perlu dan mengalihkan sebagian dana ke program yang lebih berdampak, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, infrastruktur, dan bantuan siswa. Targetnya, dalam 5

tahun porsi belanja untuk kualitas dan pengembangan bisa meningkat sehingga anggaran tidak hanya habis untuk kebutuhan rutin.

- Pada peningkatan kualitas guru, pemerintah perlu fokus pada pelatihan yang berkelanjutan, bukan hanya sekali saja, serta memberikan insentif bagi guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil. Selain itu, perlu ada sistem evaluasi kinerja guru yang jelas dan dikaitkan dengan pengembangan karier, sehingga guru termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar mereka.
- Di bidang digitalisasi sekolah, pemerintah bisa mulai dengan memperluas akses internet di sekolah, terutama di daerah terpencil, lalu menyediakan perangkat belajar seperti komputer atau tablet secara bertahap. Selain itu, penggunaan platform pembelajaran digital juga perlu didorong agar proses belajar tidak hanya bergantung pada metode konvensional.
- Terakhir, untuk mekanisme monitoring dan evaluasi, perlu dibangun sistem berbasis data yang sederhana tapi konsisten, misalnya dengan mengumpulkan data hasil belajar siswa, kehadiran guru, dan penggunaan anggaran secara rutin. Kemudian data ini bisa digunakan untuk menilai apakah program berjalan dengan baik atau tidak. Dengan adanya evaluasi yang jelas dan transparan, kebijakan bisa terus diperbaiki dari tahun ke tahun sehingga hasilnya lebih maksimal.